

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Ashiddiqie, Jimly 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, MKRI –PSHTN FH UI.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Basah, Sjachran, 1992 *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni, Bandung.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- , 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan. 2005. *Idea dan praktek dalam administrasi Negara*. Pekanbaru: Perpustakaan Nasional.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2010. *Keadilan Pemilu, ringkasan buku acuan internasional IDEA*, Jakarta, Indonesia Printer.
- Kan, J. Van dan J.H. Beekhuis. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Kresna Prima Persada.
- Karim M, Rusli. 1991. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta, CV. Rajawali.

- Lipset, Seymour Martin. 1960. *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. III. Yogyakarta, FH UII Press.
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan, 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Jogjakarta, Liberty.
- Muchsin, 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta, STIH IBLAM.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya, Universitas Airlangga.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Cetakan I. Yogyakarta, kerja sama Pustaka Pelajar dengan LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Ranjabar, Jacobus. 1998. *Sistem Sosial Budaya Indonesia suatu pengantar*. (Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), 2013. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Yogyakarta, CV. Rajawali.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta, Kanisius.
- Siahaan, Lintong O. 2005. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia "Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Daswarsa 1991-1992"*. Jakarta: Perum Perceetakan Negara RI.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung, Alumni.
- Subakti, Ramlan, 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum, Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta, Kemitraan Partnership.

Surbakti, Ramlan dkk, 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembarahuruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Ichtiar.

Wahyono, Padmo dkk, 1989. *Pejabat sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, CV Sri Rahayu.

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

## **3. Jurnal, Makalah, Internet**

Asshiddiqie, Jimly ”*Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden*,” Jurnal Unisia No 51/XXVII/I/2004.

Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, ”*The Concept of Rule of Law*”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004.

Hadjon, Philipus M. tanpa tahun. *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya, Universitas Airlangga.

Harifin A Tumpa, Selasa 2 Juni 2014, *Sengketa Pilkada*, Kolom Opini Kompas.

<http://kamusbahasaindonesia.org/penyelesaian#ixzz3CsSp2T24>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c033e1db2e9e/merespon-sema-no07-tahun-2010>.

<http://www.tempo.co/read/news/2010/10/16/057285132/Warga-Antusias-Ikuti-Pilkada-Depok>

Muchsan, Disampaikan Pada Perkuliahan Hukum tata Usaha Negara Program Magister Hukum UGM, Yogyakarta, tanggal 13 April 2012. <http://suanrosh.blogspot.com/2012/05/konsekuensi-yuridis-dikecualikannya.html>.

Muchsin, makalah dengan judul “*Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*” yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009.

Pendapat akhir presiden yang diwakili menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang Kekuasaan Kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan sidang paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2009.

Rasul, Sjahruddin. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum, Vol 21 No. 3. 2009.

Seri Demokrasi Elektoral. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Kemitraan Patnership.

Sidharta, B. Arief “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.